



Sultan Segera Gelar Pertemuan Dengan Kepala Daerah

GUBERNUR DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku akan menggelar pertemuan dengan pemerintah kabupaten/kota dalam waktu dekat ini. Tujuannya untuk menentukan skema maupun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima manfaat.

Raja Keraton Yogyakarta ini pun belum bisa memberikan gambaran terkait bantuan apa yang akan disalurkan. Sebab hal itu masih perlu dilakukan pembahasan secara lebih lanjut. "Kami di sini ada koordinasi biar pertemuannya (dalam waktu dekat), terang Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (5/9).

Tidak hanya Pemda DIY, pemerintah kabupaten/kota juga diminta menyisihkan DTU, yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil) sebesar dua persen untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.

"Untuk dua persen dari DTU itu di kabupaten kota juga ada," sambungnya.

Selain DTU, Pemda DIY juga bisa memanfaatkan anggaran Belanja Tak Terduga atau BTT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY untuk menyiapkan bantuan.

Sehingga nantinya tak hanya pemerintah pusat saja yang menyiapkan bantuan untuk warga terdampak melainkan juga disokong oleh Pemda. "Untuk bantuan tidak ha-

nya pemerintah pusat tapi daerah (memberi bantuan) bagi masyarakat yang terdampak inflasi dan kenaikan BBM," terang Sultan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Endang Patmintarsih menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima data final terkait penerima BLT BBM di wilayah DI Yogyakarta sehingga proses penyaluran belum bisa dilakukan.

"Saya belum menyampaikan karena belum final masih berubah-ubah," terang Endang saat dikonfirmasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmantha Baskara Aji mengatakan, Pemda DIY belum akan menyiapkan skema bantuan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak kenaikan harga BBM. Sebab, masyarakat miskin sudah terkover oleh program pemerintah seperti PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki pun belum ada yang dianggarkan untuk bantuan langsung dalam rangka menyikapi kenaikan harga bahan bakar.

"Jadi masyarakat miskin hampir semuanya terkover di PKH, BLT atau sembako (BPNT). Jadi semua sudah terkover. Padahal aturannya satu orang tidak boleh dapat program yang sama dari sumber berbeda pun nggak boleh baik APBN atau APBD jadi tentu kita kesulitan," terangnya. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005